

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri menyebabkan sebagian masyarakat mencari alternatif pekerjaan di luar negeri. Migrasi tenaga kerja merupakan fenomena global yang lazim terjadi, dengan mencari peluang yang lebih baik untuk menghidupi diri mereka sendiri dan keluarga mereka (Renzaho *et al.*, 2024). Menurut *International Labour Organization* (ILO) Pekerja migran merupakan orang yang melakukan migrasi dari satu negara ke negara lain dengan tujuan untuk dipekerjakan, bukan atas kemauan sendiri. Berbagai faktor yang mendorong minat seseorang untuk bekerja di luar negeri antara lain kondisi alam yang kurang mendukung secara ekonomi, ketimpangan pendapatan yang diperoleh di dalam dan luar negeri, keinginan untuk mencari pengalaman kerja di luar negeri, serta keterbatasan pemerintah dalam menyediakan kesempatan kerja (Seran *et al*, 2022).

Mobilitas tenaga kerja lintas negara terjadi sebagai respons terhadap ketimpangan kesempatan kerja, perbedaan tingkat upah, serta keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Pada tahun 2022, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia menjadi negara pengirim migran terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Filipina. Berdasarkan informasi dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (2022), total PMI pada bulan Januari sebanyak 6.436 orang, yang terdiri dari 82 persen perempuan dan 18 persen laki-laki. Selain jumlahnya yang besar, remitansi yang dilakukan pekerja migran juga memberikan dampak yang signifikan terhadap distribusi pendapatan rumah tangga di Indonesia (Sudja'i *et al*, 2021).

Remitansi memberikan kontribusi terhadap pendapatan keluarga pekerja migran di daerah asalnya dan berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Menurut BP2MI, remitansi pada tahun 2018 mencapai USD 10,9 juta, pada tahun 2019 sebesar USD 11,4 juta, pada tahun 2020 sebesar USD 9,4 juta, pada tahun 2021 sebesar USD 9,1 juta, dan pada tahun 2022 sebesar USD 9,7 juta. Angka ini berdampak positif terhadap tambahan penerimaan devisa yang merupakan salah satu indikator Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) sebagai salah satu unsur pertumbuhan ekonomi (Sayoga *et al*, 2017).

Tabel 1.1 Provinsi Asal Pekerja Migran Indonesia Terbanyak Tahun 2023

No.	Nama Data	Nilai
1.	Jawa Timur	68.069
2.	Jawa Tengah	59.009
3.	Jawa Barat	52.961
4.	Nusa Tenggara Barat	33.949
5.	Lampung	21.539
6.	Sumatera Utara	10.550
7.	Bali	9.359
8.	Banten	3.183
9.	Sumatera Selatan	2.088
10.	Sulawesi Selatan	2.076

Sumber: katadata, 2025

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melaporkan, pada tahun 2023 PMI asal Jawa Timur mendominasi, yaitu 68.069 orang atau 24,75% dari total PMI pada tahun sebelumnya (Tabel 1.). Jawa Timur menurut Badan Pusat Statistik tahun 2024 mempunyai 33 Kabupaten/Kota termasuk 4 Kabupaten di Pulau Madura. Pulau Madura terletak di sebelah laut Pulau Jawa. Pulau Madura terbagi menjadi empat Kabupaten yaitu Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Jumlah PMI di setiap Kabupaten di Pulau Madura berbeda beda pada Tahun 2023 yaitu Kabupaten Bangkalan dengan jumlah tertinggi yaitu 616 orang, Kabupaten Sampang 501 orang, Kabupaten Pamekasan 301 orang, dan Kabupaten Sumenep 411 orang (BP2MI, 2025).

Kabupaten Bangkalan menjadi penyalur pekerja migran terbanyak di Pulau Madura tahun 2023. Berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Bangkalan, sejak Januari 2015 sampai Juni 2019 ada 3.047 Pencari Kerja (Pencaker). Kemudian, pada 1 Januari sampai 30 Juni tahun 2019, jumlah Pencaker sebanyak 191 orang (Jawapos, 2024). Dari 191 pencaker tersebut, 102 diantaranya sudah bekerja dengan 52 orang ditempatkan di dalam negeri dan 50 orang sisanya di luar negeri.

Tabel 1.2 Data Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 sampai 2023

Tahun	Jumlah (orang)
2019	153
2020	26
2021	112
2022	407
2023	616

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan, 2025

Berdasarkan tabel 1.2, dapat disimpulkan bahwa pekerja migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Bangkalan mengalami peningkatan terutama pada tahun 2023. Menurut Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Jakarta, pemicu fenomena menjadi Pekerja Migran Indonesia, di akibatkan oleh kesempatan ekonomi yang terbatas di Indonesia, upah yang lebih tinggi di luar negeri dibandingkan di dalam negeri.

Setelah memperoleh penghasilan dari negara tujuan, PMI mengalokasikan dana untuk pengiriman uang kepada keluarga di tanah air. Jumlah besarnya pendapatan atau upah PMI yang dikirim ke keluarganya akan berdampak pada kondisi kehidupan perekonomian keluarganya. Keluarga sendiri mempunyai peran utama dalam mengambil keputusan untuk pemanfaatan atau pengelolaan uang yang dikirim dari luar negeri atau remitansi. Remitansi yang disalurkan ke daerah

Asal berpotensi meningkatkan kondisi ekonomi keluarga migran ke arah yang lebih sejahtera apabila dikelola secara efektif. Remitansi memiliki nilai sosial dan ekonomi yang penting, tidak hanya bagi penerima manfaat, tetapi juga berkontribusi terhadap pemerataan pembangunan di suatu wilayah. Bagi keluarga migran, dana tersebut menjadi sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari termasuk konsumsi. (Larasati, 2023). Tetapi penggunaan remitansi cenderung pada kebutuhan konsumtif, seperti pembelian barang dan jasa sehari – hari, dibandingkan dengan tujuan produktif lainnya seperti investasi atau tabungan produktif (Algifari R *et al.*, 2023).

Konsumsi merupakan pengeluaran seseorang untuk memenuhi kepuasan atau kebutuhannya dalam berupa membeli suatu barang atau jasa. Kegiatan Konsumsi ini akan terus terjadi jika manusia memiliki uang atau harta (Fadhli *et al.*, 2021). Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2025 menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga masih menjadi komponen terbesar dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2025 sekitar 53,14% dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Pola konsumsi dapat dijadikan sbagai salah satu indikator pengukur kesejahteraan rumah tangga (Pradani *et al.*, 2021). Masyarakat dengan kesejahteraan yang tergolong rendah memiliki pola konsumsi yang hanya terfokus pada pengeluaran makanan pokok. Sebaliknya pola konsumsi masyarakat yang lebih sejahtera, didominasi pada pengeluaran non-makanan. Berikut adalah persentase pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok komoditas di Kabupaten Bangkalan Tahun 2023 :

Tabel 1.3 Presentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di Kabupaten Bangkalan Tahun 2023

Makanan	Non Makanan
62,25%	37,48%

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan, 2024

Tabel 1.3 menunjukkan mayoritas pengeluaran per kapita pada tahun 2023 di Kabupaten Bangkalan di dominasi oleh pengeluaran yang berupa bahan makanan. Hal ini disebabkan pola konsumsi masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah biasanya didominasi oleh konsumsi kebutuhan – kebutuhan pokok atau dasar seperti makanan (wei *et al*, 2020).

Pola konsumsi adalah salah satu indikator penting dalam menganalisis kondisi ekonomi masyarakat, karena menunjukkan bagaimana pendapatan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan keinginan konsumtif. Menurut penelitian Jane *et al.*, (2023) pengeluaran konsumsi rumah tangga dibagi menjadi konsumsi pangan dan non-pangan, dan kedua komponen ini berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pada kondisi ini, semakin optimal alokasi konsumsi terhadap kebutuhan dasar seperti pangan dan non-pangan, semakin besar kemungkinan tercapainya kesejahteraan ekonomi yang lebih tinggi.

Penelitian serupa telah dilakukan oleh Yusfamita *et al.*, (2013) yaitu membahas tentang pola konsumsi tenaga kerja migran mie sedaap di Kota Gresik Pramesti (2020) menganalisis pemanfaatan remitansi dan tingkat konsumsi keluarga pekerja migran Indonesia (PMI) dalam perspektif ekonomi islam di Desa Suruhan Lor Kecamatan Bandung Tulungagung dan Erawati (2023) menganalisis dampak bekerja di luar negeri terhadap kondisi sosial dan ekonomi keluarga pekerja migran Indonesia (PMI) Di Desa Lepak, Kabupaten Lombok Timur. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam menganalisis pola konsumsi pekerja migran (pmi) sehingga menjadi gap dalam penelitian. Objek penelitian ini adalah pekerja migran (pmi) di Kabupaten Bangkalan sebagai kebaruan dalam penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini berjudul “*Analisis Pola Konsumsi Pekerja Migran (PMI) Di Kabupaten Bangkalan*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pola konsumsi pangan dan non pangan serta kaitannya dengan tingkat kesejahteraan ekonomi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pola konsumsi pangan dan non pangan serta kaitannya dengan tingkat kesejahteraan ekonomi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Bangkalan?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan manfaat dalam memperluas pengetahuan, wawasan, serta pemahaman mengenai pola konsumsi, kesejahteraan dan diharapkan dapat berperan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menjadi sebuah bahan informasi dan sebagai referensi tambahan yang berkaitan dengan teori konsumsi di dalam penelitian yaitu pola konsumsi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Bangkalan.